

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KELAS II



TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

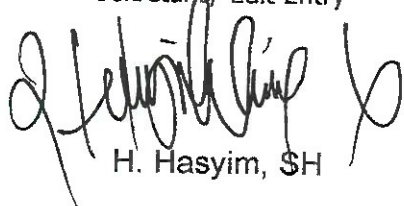
**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN**

**SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI SINGKIL
KELAS II**


Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017

Sekretaris/ Edit Entry


H. Hasyim, SH

Ketua Tim Survey


Said Rachmad, SH.MH

Disahkan di Singkil:

Pada Hari Rabu, 30 Desember 2020

Ketua Pengadilan Negeri singkil
Sebagai Top Management,



H. Hamzah Sulaiman, SH.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Singkil	22
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Pada Pengadilan Negeri Singkil	22
BAB IV	24
PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Rekomendasi	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pada Pengadilan Negeri Idi berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang

mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan atau data minimal 120 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Hakim Pengawas Bidang Hukum). Hakim Pengawas Bidang Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4 (*skala Linert*). Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkil yaitu se wilayah kabupaten Aceh Singkil.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

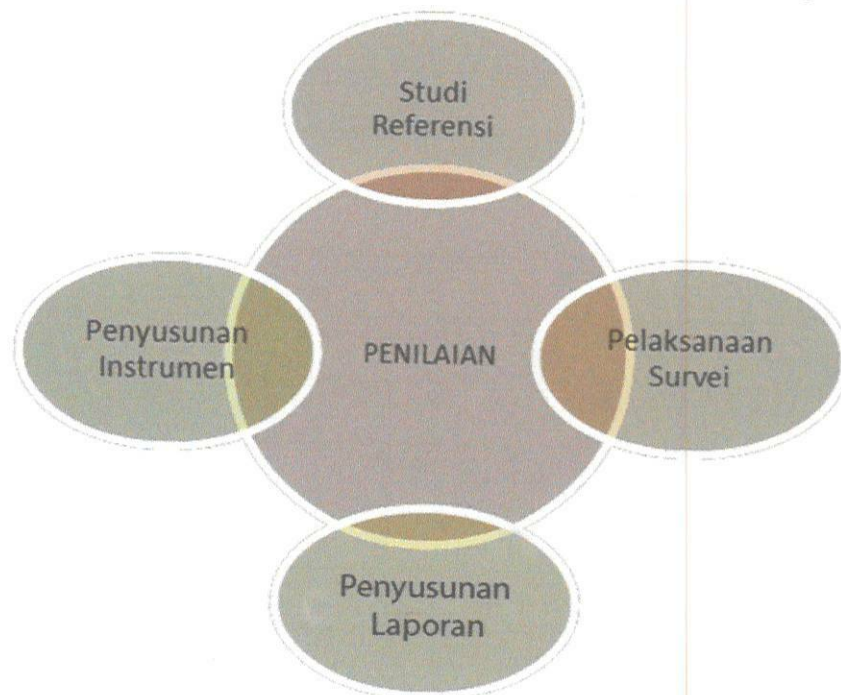
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transaksi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

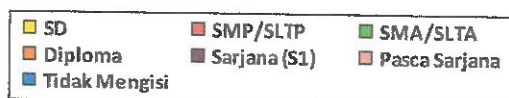
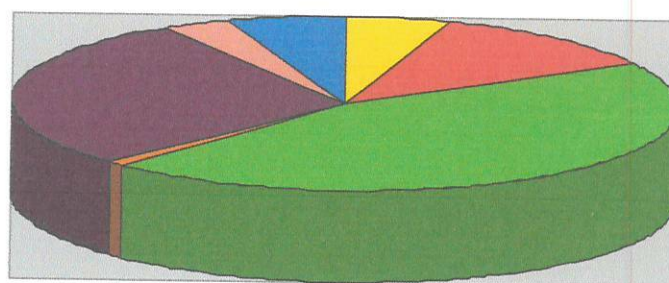
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan pada Pengadilan Negeri Singkil mayoritas memiliki latar pendidikan Sekolah Menengah Atas sejumlah 52,5%

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD	6	5%
2	SMP/SLTP	14	11,6%
3	SMA/SLTA	54	45%
4	Diploma	1	0,83%
5	Sarjana (S1)	34	28,3%
6	Pasca Sarjana	4	3,3%
7	Tidak Mengisi	7	5,83%
Jumlah		120	100%

Gambar 1.



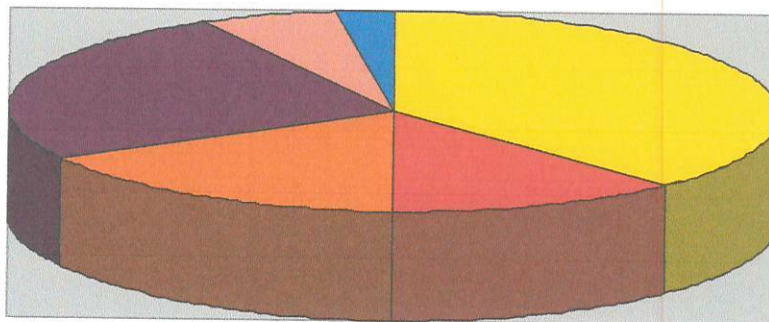
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 57,5 % responden pengguna layanan yang mengikuti survey pada pengadilan Negeri Singkil adalah Masyarakat lainnya.

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Polri atau PNS	45	37,5%
2	Advokat/Pengacara	15	12,5%
3	Terdakwa	0	0%
4	Para Pihak yang berperkara	20	16,6%
5	Mahasiswa	30	25%
6	Wartawan	7	5,83%
7	Masyarakat lain selaku pengguna Pengadilan Negeri Singkil	3	2,5%
Jumlah		120	100%

Gambar 2.



- Polri atau PNS
- Advokat/Pengacara
- Terdakwa
- Para Pihak yang berperkara
- Mahasiswa
- Wartawan
- Masyarakat lain selaku pengguna Pengadilan Negeri Singkil

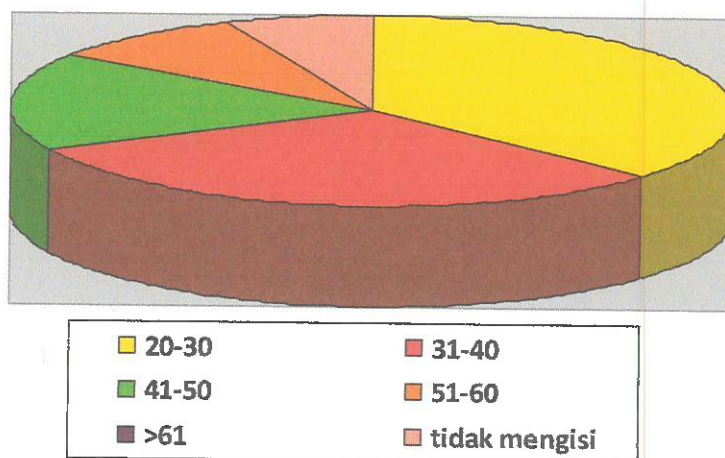
3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada pengadilan Negeri Singkil berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengikuti Survey berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21 tahun s/d 30 tahun, dan usia antara 31 tahun s/d 40 tahun.

Tabel 7.
Kelompok Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	20-30	44	36,6%
2	31-40	37	30,83%
3	41-50	20	16,6%
4	51-60	11	9,16%
5	61>	0	0%
6	Tidak mencantumkan Usia	8	6,6%
Jumlah		120	100%

Gambar 3.



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

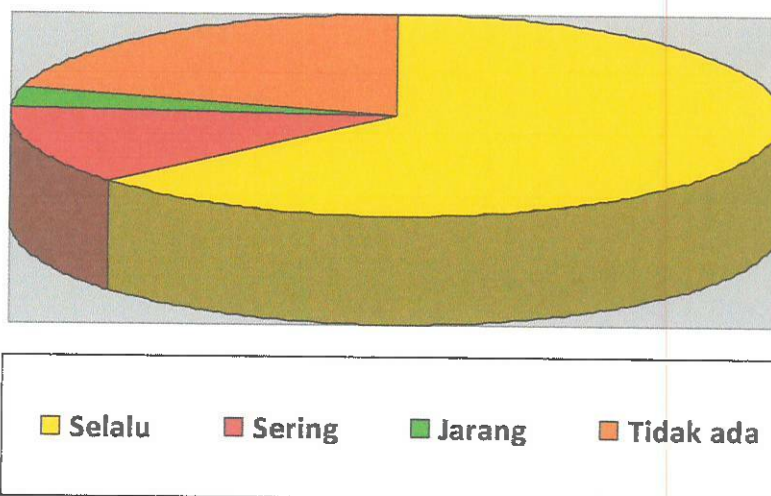
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3.18. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pada Pengadilan Negeri Singkil cukup bersih dari manipulasi peraturan.

Tabel 9.
Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	76	63,3%
2.	Sering	3	15	12,5%
3.	Jarang	2	4	3,3%
4.	Tidak Ada	1	25	20,83%
Jumlah			120	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.

Gambar 4.



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

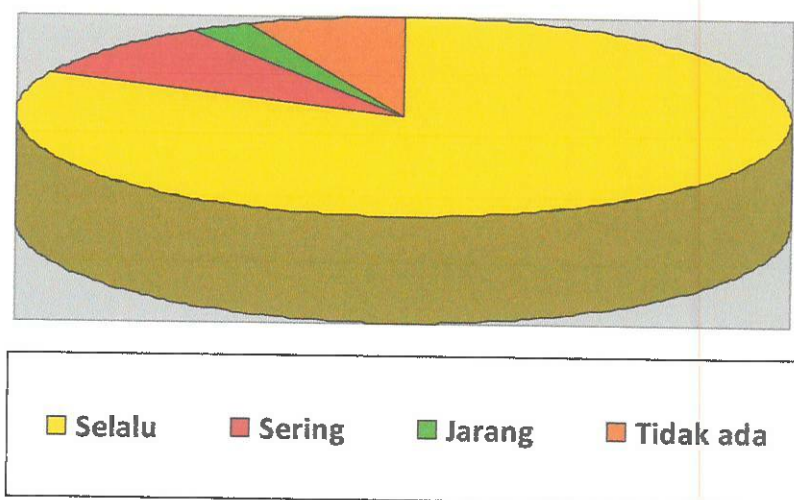
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3.66. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pada Pengadilan Negeri Singkil bersih dari penyalahgunaan jabatan.

Tabel 10.
Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	98	81,6%
2.	Sering	3	11	9,16%
3.	Jarang	2	3	2,5%
4.	Tidak Ada	1	8	6,6%
Jumlah			120	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.

Gambar 5



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

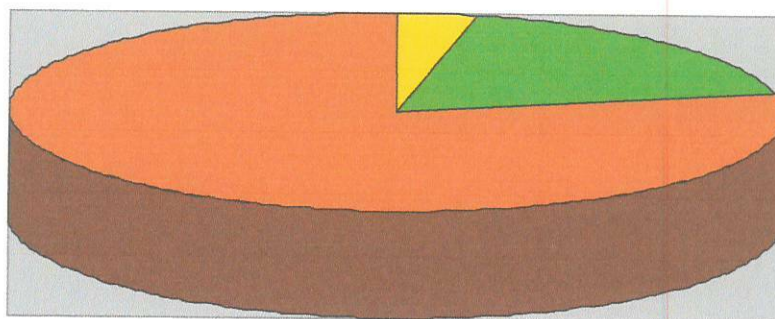
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3.72. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pada Pengadilan Negeri Singkil Bersih dari menjual pengaruh.

Tabel 11.
Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Ada	4	94	78,3%
2.	Jarang	3	22	18,3%
3.	Sering	2	0	0%
4.	Selalu	1	4	3,3%
Jumlah			120	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.

Gambar 6.



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

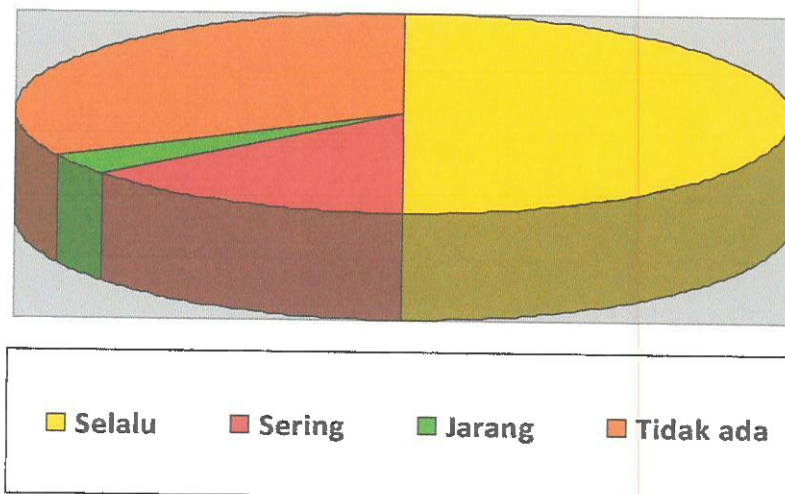
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 2.82. Dari nilai indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pada Pengadilan Negeri Singkil bersih dalam hal transparansi biaya.

Tabel 12.
Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	60	50%
2.	Sering	3	17	14,16%
3.	Jarang	2	4	3,3%
4.	Tidak Ada	1	39	32,5%
Jumlah			120	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Gambar 7.



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

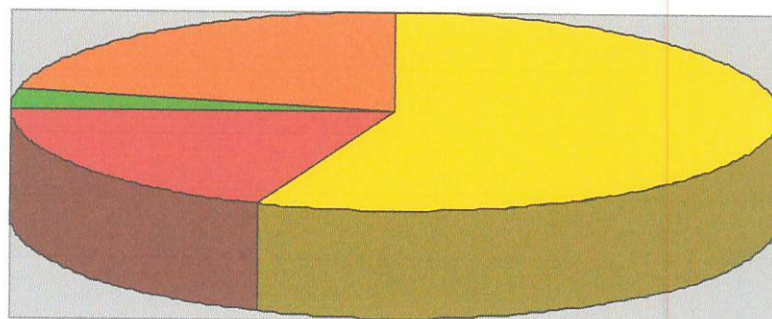
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3.09. Dari indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pada Pengadilan Negeri Singkil cukup bersih dari biaya tambahan.

Tabel 13.
Indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	67	55,83%
2.	Sering	3	23	19,16%
3.	Jarang	2	4	3,3%
4.	Tidak Ada	1	26	21,6%
Jumlah			120	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.

Gambar 8.



3.2.6. Indikator Hadiah

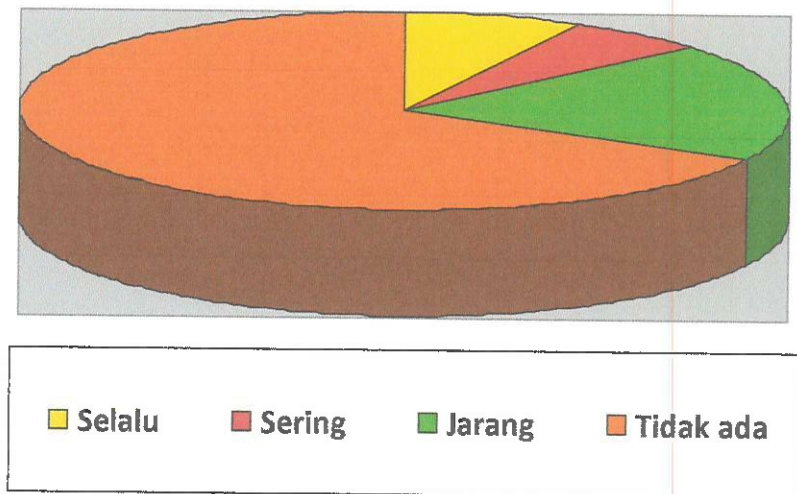
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3.47. Dari hasil indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pada Pengadilan Negeri Singkil bersih dari hadiah.

Tabel 14.
Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Ada	4	81	67,5%
2.	Jarang	3	23	19,16%
3.	Sering	2	7	5,83%
4.	Selalu	1	9	7,5%
Jumlah			120	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.

Gambar 9.



3.2.7. Indikator Transaksi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 2.73 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pada Pengadilan Negeri Singkil bersih

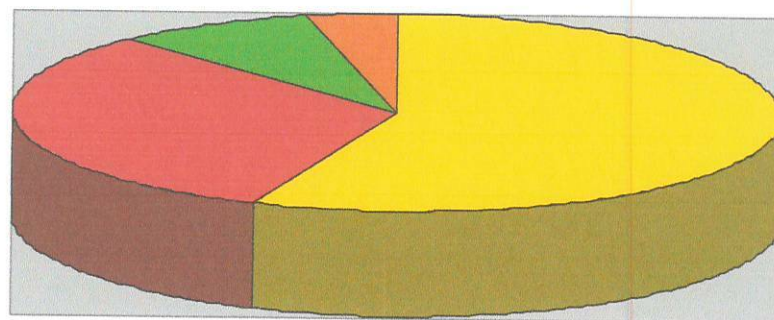
dalam transparansi biaya.

Tabel 15.
Indikator Transaksi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	59	49,16%
2.	Sering	3	11	27,5%
3.	Jarang	2	9	7,5%
4.	Tidak Ada	1	4	3,3%
Jumlah			120	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.

Gambar 10.



3.2.8. Indikator Percaloan

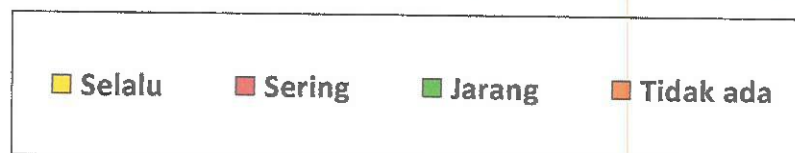
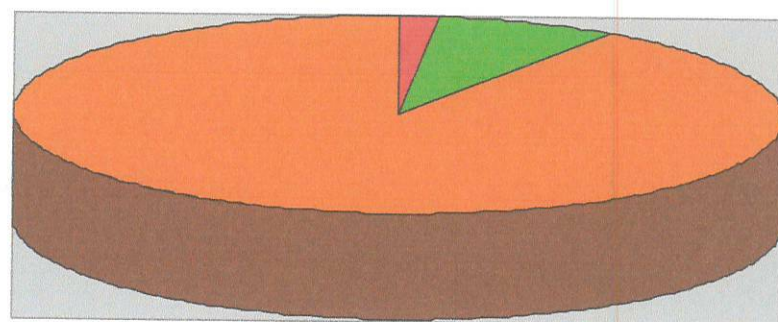
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3.89. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pada Pengadilan Negeri Singkil Bersih dari percaloan.

Tabel 16.
Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Ada	4	109	90,83%
2.	Jarang	3	9	7,5%
3.	Sering	2	2	1,6%
4.	Selalu	1	0	0%
Jumlah			120	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.

Gambar 11.



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,88.

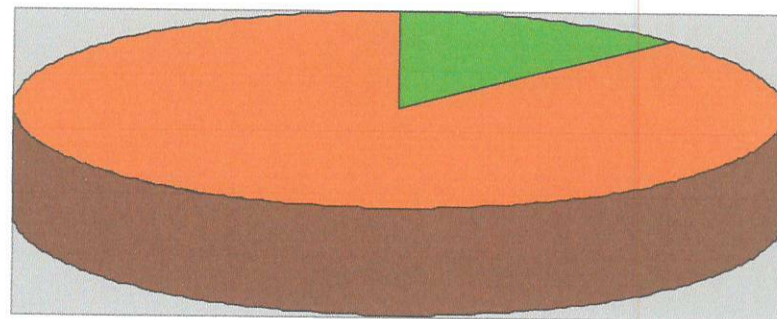
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pada Pengadilan Negeri Singkil Bersih dari tindakan perbuatan curang.

Tabel 17.
Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Ada	4	105	87,5%
2.	Jarang	3	15	12,5%
3.	Sering	2	0	0%
4.	Selalu	1	0	0%
Jumlah			120	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.

Gambar 12.



■ Selalu ■ Sering ■ Jarang ■ Tidak ada

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3.90

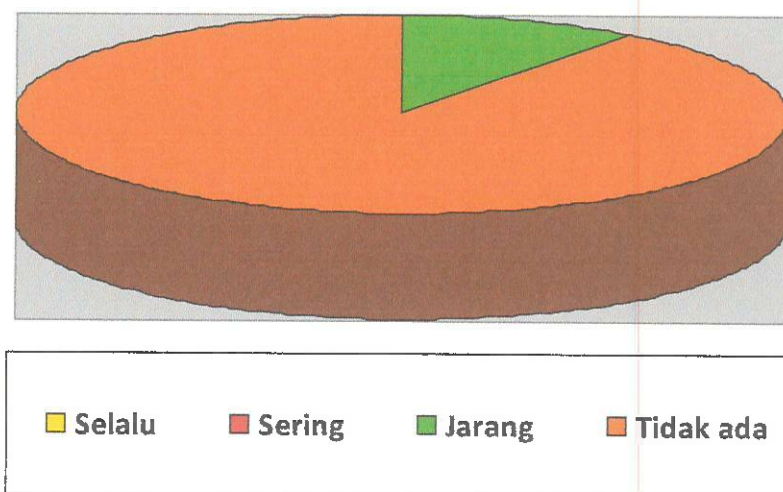
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pada Pengadilan Negeri Singkil Bersih dari Transaksi Rahasia

Tabel 18.
Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Ada	4	108	90%
2.	Jarang	3	12	10%
3.	Sering	2	0	0%
4.	Selalu	1	0	0%
Jumlah			120	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini.

Gambar 13.



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Singkil

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Singkil sebesar 3.43. Indeks **3.43** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi korupsi di bawah ini, maka menghasilkan skor **88,68**. Skor tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tabel 19.

Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Singkil

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Pada Pengadilan Negeri Singkil

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi Pada Pengadilan Negeri Singkil.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Pada
Pengadilan Negeri Singkil

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan pada pengadilan Negeri Singkil
1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipertahankan lagi, sehingga meminimalisir hubungan langsung antara pegawai dan masyarakatan pengguna layanan pengadilan
2	Biaya-biaya yang dipergunakan dalam perkara sebaiknya dipublikasi misalnya biaya pemanggilan relaas, eksekusi, dll.
3.	Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh petugas pelayanan sesuai dengan SOP dan jangka waktu
4.	Informasi layanan pengadilan agar lebih mudah diakses baik menyediakan leaflet pada meja PTSP atau dalam Website pengadilan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Idi diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Singkil memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.43** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.18;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, indeks 3.66;
3. Indikator Menjual Pengaruh, indeks 3.72;
4. Indikator Transaksi Biaya, indeks 2.82;
5. Indikator Biaya Tambahan, indeks 3.09;
6. Indikator Hadiah, indeks 3.47;
7. Indikator Transparansi Biaya, indeks 2.73;
8. Indikator Percaloan, indeks 3.89;
9. Indikator Perbuatan Curang, indeks 3.88;
10. Indikator Transaksi Rahasia, indeks 3.90.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada seluruh indikator penilaian pada Satuan Kerja pengadilan Negeri Singkil Tahun 2020 periode Juli s/d Desember tersebut di atas, diketahui bahwa indikator "Manipulasi Peraturan" memiliki nilai indeks paling rendah diantara indikator lainnya, karena itu perlu dievaluasi lagi.